

BAB III
PEMBIAYAAN MIKRO PT BANK BRI SYARIAH KC BANDUNG
CITARUM

A. Sejarah PT Bank BRI Syariah

Sejarah pendirian PT Bank BRISyariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah.

Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRISyariah terus tumbuh secara positif.

BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.³¹ Bank BRI Syariah KC Citarum Bandung telah berdiri sejak 20 Agustus 2009 hingga sekarang di Jl. Citarum No. 4 Bandung.

B. Visi dan Misi Bank BRI KC Bandung Citarum

1. Visi Bank Syariah KC Bandung Citarum

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi Bank Syariah KC Bandung Citarum:

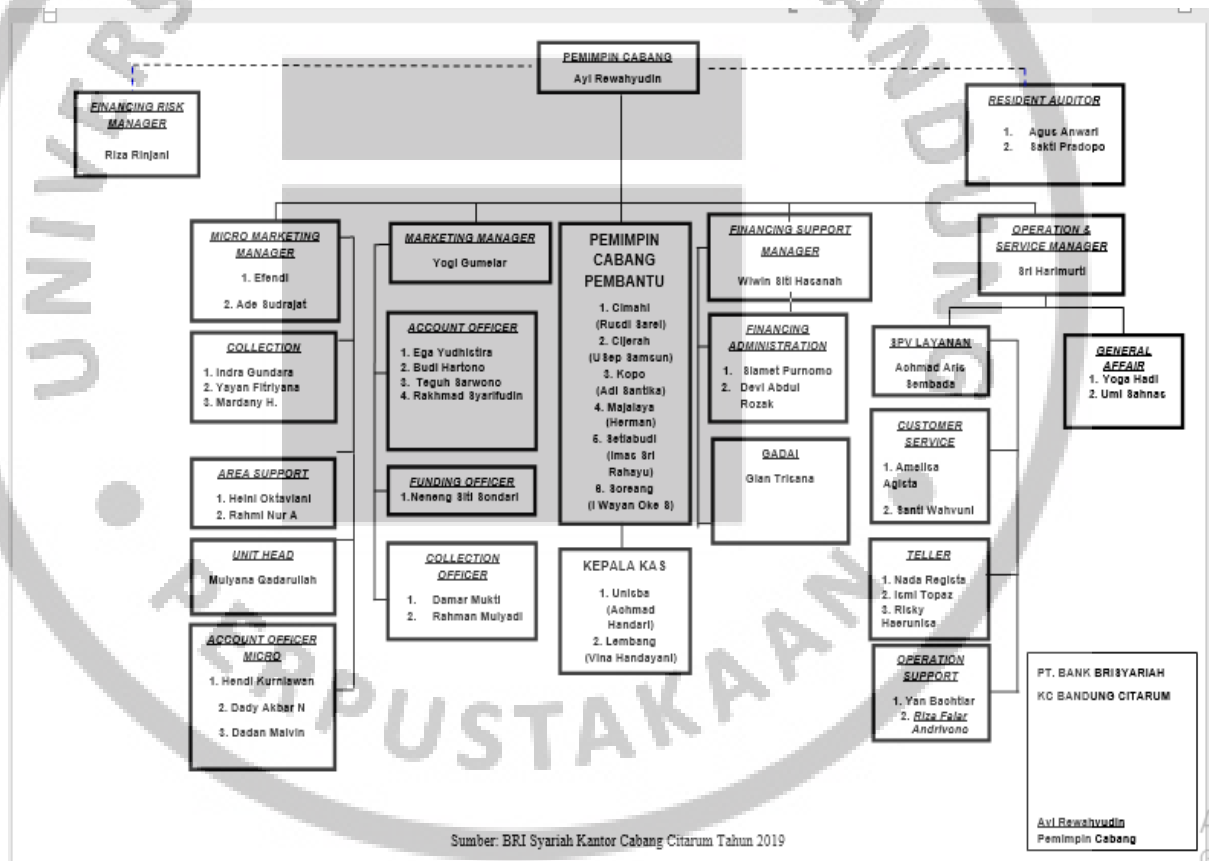
- a. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- c. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

³¹PT Bank BRI Syariah Tbk, "BRI Syariah," Pembiayaan Mikro BRI Syariah, 2017, <https://www.brisyariah.co.id/>.

- d. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.³²

C. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antar unsur-unsur organisasi maka harus ada struktur organisasi yang jelas.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi

³²PT Bank BRI Syariah Tbk, "BRI Syariah," Visi Misi Bank Syariah, 2017, <https://www.brisyariah.co.id/>.

D. Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum

Pembiayaan Mikro adalah penyertaan modal secara tidak langsung dalam bentuk kerja sama kepada perusahaan pasangan usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 250.000.000,- setiap tahunnya atau memiliki omset setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00,- setiap bulan. UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha mikro dapat dikategorikan sebagai usaha kecil sepanjang omsetnya berada dibawah Rp. 50.000.000,00,- memiliki aset kurang dari Rp 200.000.000,00,- diluar tanah dan bangunan dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha besar.³³

Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Kemudian pihak Account Officer mikro PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung menerapkan metode analisis 5C dari kelima metode analisis yang digunakan metode Character dan Capacity yang sangat dominan digunakan dan menjadi pedoman sebagai tolak ukur dalam menganalisis.³⁴

³³Ernain, Rusliyawati Rusliyawati, dan Imelda Sinaga, "Sistem Pendukung Keputusan Pembiayaan Mikro Berbasis Client Server Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan Bandar Lampung" (Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta: SNATI 2011, 2011), 29.

³⁴Fahrianti Mega "Analisis Sistem Kelayakan Pembiayaan Mikro," *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* no.1 (2020): 82.

1. Jenis Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Terdapat jenis-jenis pembiayaan Mikro diantara lain : Mikro 25iB, Mikro 75iB, Mikro 200 iB, dan Kredit Usaha Rakyat.³⁵

Tabel 1. 1 Jenis Pembiayaan Mikro

Keterangan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 200iB	KUR Mikro iB
Limit Pembiayaan	Rp. 5 Juta s.d 25 Juta	Rp 25 juta s.d 75 juta	Rp > 75 juta s.d 200 juta	s.d Rp 25 juta
Tenor	3-12bulan	6-36bulan	6-60bulan	6-60bulan
Pembiayaan		6-60bulan	-	-
Jaminan/Agunan	Tanpa agunan	Kendaraan Bermotor, Kios, Los Tanah Kosong, Tanah dan Bangunan Deposito BRI Syariah	Kendaraan Bermotor, Kios, Los Tanah Kosong, Tanah dan bangunan Deposito BRI Syariah	Agunan wajib tidak
Dokumen Agunan	- iB	SHM, SHGB, SHMSRS, AJB/Letter C/Girik. Petok D,BPKB, SHPTU/SIPTU ,BPKB, Gadai Deposit	SHM, SHGB, SHMSRS,BPK B, SHPTU/SIPTU, Gadai Deposit	-

a. Pembiayaan Mikro 25

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 5 – 25 juta, dengan tenggang waktu antara 3 – 12 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli

³⁵ Tbk, "BRI Syariah," 2017.

yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah biasanya margin yang di berikan berkisar antara 2 – 1,2% per bulan, kelebihan produk ini adalah tidak adanya jaminan dari nasabah karena produk ini masuk dalam jenis produk KTA (Kredit Tanpa Agunan).³⁶

b. Pembiayaan Mikro 75 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 25 – 75 juta, dengan tenggang waktu antara 6 – 60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah biasanya margin yang di berikan berkisar antara 1,4 – 1,2% per bulan.

c. Pembiayaan Mikro 200iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 75 – 200 juta, dengan tenggang waktu 6-60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan

³⁶ Trisnawati, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB di BRI Syariah KC Bengkulu,” 4.

dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah biasanya margin yang di berikan berkisar antara 1,02% per bulan.³⁷

d. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.³⁸

2. Skema Pembiayaan Mikro BRI Syariah

a. Dokumen Identitas (Copy)

³⁷ Trisnawati, 5.

³⁸Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Kredit Usaha Rakyat," Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat, 2016, kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan.

- b. E-KTP calon Nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih berlaku.
 - c. Kartu Keluarga dan akta nikah. Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda)
 - d. Surat izin usaha / Surat Keterangan usaha (SKU Asli)
 - e. NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta
3. Aplikasi Pengajuan Pembiayaan
- a. Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah.
 - b. Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan
 - c. SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (Wajib untuk jaminan Tanah & Bangunan) (SPPT & STTS asli)
 - d. FC agunan dan IMB jika ada
 - e. Bukti Riwayat pembiayaan di Bank³⁹

Skema keuangan mikro telah beroperasi sejak 1960-an, namun sebagian besar melibatkan keuangan konvensional, sedangkan banyak Muslim berpendapatan rendah lebih suka memiliki keuangan yang sesuai syariah. Keuangan mikro dan keuangan Islam juga memiliki perbedaan, yang mengarah pada fakta bahwa keuangan mikro seperti itu tidak dapat memenuhi kebutuhan umat Islam yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip

³⁹ Tbk, "BRI Syariah," 2017.

agama. dalam keuangan mikro, transaksi dapat terjadi antara lembaga keuangan mikro dan pengusaha mikro.⁴⁰

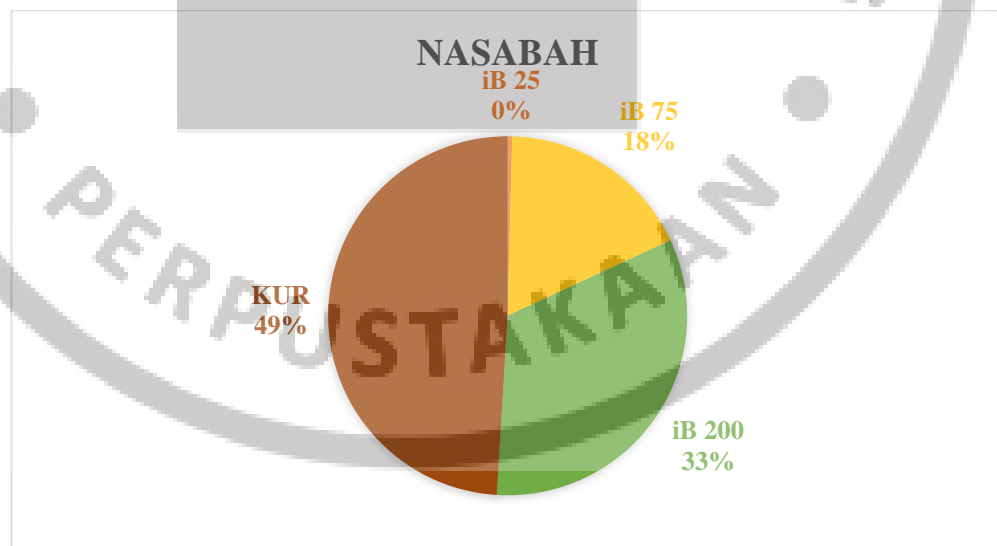
4. Jumlah nasabah pada Jenis Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bandung Citarum

Jumlah dana dan nasabah pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KC Bandung Citarum pada data terakhir bulan April 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Total jumlah Pengajuan Pembiayaan Mikro

Dana	Jumlah Nasabah
Rp 122.296.000.000.000	2.488

Berikut grafik pada jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro dari setiap Jenis Pembiayaan Mikro iB BRI Syariah KC Bandung Citarum.



Sumber: BRI Syariah KC Bandung Citarum

Grafik 1. 1 Presentase nasabah Pembiayaan Mikro

⁴⁰ Marek Hudon, *A Research Agenda for Financial Inclusion and Microfinance* (Belgium: Edward Elgar Publishing, 2019).

Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pembiayaan KUR yang banyak diajukan oleh nasabah, jumlah nasabah pada jenis pembiayaan mikro KUR yaitu presentase 49% dengan jumlah nasabah sebanyak 1.220 nasabah dan jumlah dana Rp. 45.147.000.000.000, pada peringkat ke 2 yaitu pada jenis pembiayaan mikro 200iB yaitu presentase 33% dengan jumlah nasabah sebanyak 818 nasabah dan jumlah dana Rp. 52.883.000.000.000, selanjutnya di peringkat 3 yaitu jenis pembiayaan mikro 75iB yaitu presentase 18% dengan jumlah nasabah sebanyak 440 nasabah dan jumlah dana Rp. 21.914.000.000.000, dan yang terakhir pada jenis pembiayaan mikro 25iB yaitu presentase 0% dengan memiliki jumlah sedikit nasabah yaitu sebanyak 10 nasabah dan jumlah dana Rp. 96.600.000.,⁴¹

E. Mekanisme Pembiayaan Mikro

Mekanisme pembiayaan mikro adalah:

1. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan dengan mengisi form pembiayaan mikro yang dilakukan secara kolektif. Form pembiayaan ini berisi tentang jumlah pembiayaan, jangka waktu, tujuan pembiayaan dan angsuran yang dimohon. Jika angsuran yang dimohon nasabah tidak disetujui oleh pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung, maka pihak bank akan menghubungi calon nasabah dan memberitahu tentang jumlah

⁴¹ Gunandra, Masalah Pembiayaan Mikro.

pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan. Adapun kelengkapan yang harus diserahkan antara lain:

a. Foto kopi KTP (Suami/istri)

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal nasabah. KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi keaslian tanda tangan calon nasabah.

b. Foto kopi akte nikah/cerai

Foto kopi akte nikah ini adalah untuk melihat keaslian data yang ada pada KTP, dan untuk melihat nama ibu dari nasabah.

Kenapa yang dilihat dan yang dijadikan aturan adalah nama ibu, karena biasanya sampai kapanpun nama ibu tidak akan lupa dan tidak akan tergantikan.

c. Foto kopi Kartu keluarga

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah.

d. Surat Persetujuan Suami/istri Bermaterai.

Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank. Jadi, surat keterangan dari suami/istri sangat diperlukan. Dan jika masih belum menikah harus membuat surat keterangan yang dibubuhi dengan materai

2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan berisi bahwa perusahaan telah merekomendasikan/mengijinkan karyawan untuk menikmati fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif melalui Bank BRI Syariah. Perjanjian pembiayaan ini ditandatangani oleh kepala perusahaan dengan Kepala Bank BRI Syariah Kantor cabang Citarum Bandung.

3. Persetujuan Komite Pembiayaan

Proses sebelum dilakukan persetujuan oleh komite pembiayaan, maka pembiayaan yang akan diajukan tersebut harus dianalisis oleh analis pembiayaan, apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah layak untuk dibiayai atau tidak. Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung, analis pembiayaan menerapkan prinsip pembiayaan yang tertuang dalam analisis 5C.

4. Pembukaan Rekening Nasabah

Mekanisme pembukaan rekening nasabah jika setuju dan pembiayaan mikro tersebut juga disetujui oleh Komite pembiayaan, maka nasabah yang telah disetujui dianjurkan untuk membuka rekening di Bank BRI Syariah Kantor Citarum Bandung. Atas nama individu/bukan perusahaan. Pembukaan rekening dan penandatanganan akad bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

5. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad ini digunakan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung, untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh manfaat atau jasa.

6. Persetujuan

Proses persetujuan ini, pihak bank akan memberikan surat persetujuan dan kuasa yang harus ditandatangani oleh bendahara gaji yang bertanggung jawab dengan nasabah. Surat persetujuan ini harus dibawa pulang dan harus diserahkan/ dikembalikan kepada bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung pada waktu proses pencairan.

7. Pencairan

Pencairan terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang disiposisikan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan telah lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- a. Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
- b. Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.⁴²

⁴² Jannah Miftahul "Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah, Studi pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya" *Jurnal Ekonomi*, no 2 (2015): 67-70.

F. Proses Evaluasi Pemberian Pembiayaan Mikro BRI Syariah Cabang Citarum Bandung

1. Penetapan pasar sasaran

Sasaran nasabah pembiayaan usaha mikro adalah kelompok ataupun individu dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar, atau suatu daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru/perusahaan bisnis. Penetapan pasar sasaran bertujuan agar pemberian pembiayaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki BRI Syariah Cabang Kendari sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak.

2. Proses pemberian putusan pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan merupakan tahapantahapan yang dilalui oleh nasabah maupun kreditur sehingga pembiayaan tersebut dapat diberikan. Tahapan proses pemberian putusan pembiayaan tersebut adalah prakarsa dan permohonan pembiayaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, negosiasi pembiayaan, penetapan struktur dan tipe pembiayaan, rekomendasi dan pemberian putusan pembiayaan, kelengkapan paket pembiayaan, serta pemberian putusan pembiayaan.

3. Proses realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan BRI Syariah Cabang Kendari akan melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan dokumen dan administrasi pembiayaan persetujuan pencairan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.⁴³

G. Masalah Pembiayaan Mikro

Beberapa kriteria permasalahan yang disebabkan diantaranya ada dua kategori permasalahan pada sebelum pembiayaan mikro dan permasalahan pada sesudah pembiayaan mikro. Dimana pada BRI Syariah KC Bandung Citarum terdapat masalah pembiayaan mikro terjadi adanya Faktor Internal dan Faktor Eksternal, dimana faktor internal terdiri dari beberapa aspek yaitu Aspek Analisa Karyawan, dan Aspek Inisiasi Awal. Sedangkan pada faktor eksternal terdiri dari Aspek Aspek Kebijakan Pemerintah di Sektor UMKM, Aspek peranan Lembaga terkait, Aspek Peningkatan Manajerial, Aspek Margin.⁴⁴

1. Faktor Internal

Faktor Internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank seperti keputusan yang berkaitan dengan

⁴³ Muhamad Turmudi "Pembiayaan Mikro BRISyariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari" *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* no.1 (2015):67

⁴⁴ Gunandra.

permodalan, pembiayaan serta pengelolaan risiko bank.⁴⁵ Beberapa aspek faktor Internal:

a. Aspek Analisa Karyawan

Kinerja karyawan sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Kinerja karyawan diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.⁴⁶

Kinerja karyawan baik atau tidak, tergantung pada hasil perbandingannya dengan standar pekerjaan, karena kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning*.⁴⁷

b. Aspek Inisiasi Awal

Aspek Inisiasi awal disebut sebagai faktor analisis SWOT yang artinya adalah singkatan dari *Strength, Weakness, Opportunities*, dan *Threats*. Seperti namanya, Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan

⁴⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, "Kebijakan Moneter dan Perbankan,"* 1 ed. (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2005).

⁴⁶ Gadis Gayatri, Amir Imbaruddin, dan Muttaqin Muttaqin, "Analisis Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Cendrawasih Makassar," *Jurnal Administrasi Negara* 24, no. 3 (2018): 190.

⁴⁷ Sembiring Masana, *Budaya Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)* (Bandung: Fokus Media, 2012).

(*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru.⁴⁸

1) Kekuatan (*strength*)

Analisis ini menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Pihak perusahaan atau organisasi bisa menganalisis apa saja kelebihan usaha, keunggulan yang dimiliki usaha, serta keunikan usaha yang membedakannya dengan usaha lainnya. Dalam analisis SWOT biasanya dimasukkan sebanyak mungkin hal positif yang menonjolkan kekuatan dan keunggulan dari usaha tersebut.

2) Kelemahan (*weakness*)

Mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki oleh sebuah usaha, posisikan diri Anda sebagai konsumen yang biasanya lebih tahu apa yang kurang dari sebuah usaha anda. Selain itu, menganalisis hal apa yang dimiliki oleh sebuah usaha lain tapi tidak dimiliki oleh usaha Anda, faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan atau kerugian, dan apa yang membuat usaha lain lebih baik dari usaha Anda.

3) Peluang (*opportunity*)

Analisis peluang sangat penting bagi sebuah usaha karena hal inilah yang akan menentukan perkembangan sebuah usaha

⁴⁸ Mekari, "Jurnal Entrepreneur," Analisis SWOT: Manfaat, Faktor, dan Contohnya, 2020, <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-manfaat-faktor-yang-memengaruhi-dan-contoh-analisis-swot/>.

di kemudian hari. Anda harus melihat peluang apa saja yang ada dan perkembangan tren apa bisa membantu usaha tersebut lebih berkembang. Hal ini menjadi penting agar Anda mampu bertahan dan diterima di masyarakat.

4) Ancaman (*threat*)

Analisis ancaman mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi sebuah usaha yang dapat menghambat perkembangan usaha tersebut. Anda harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak.

Beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya ketersediaan sumber daya, apa saja yang dilakukan pesaing, ada berapa jumlah pesaing, bagaimana minat konsumen, dan juga kekuatan finansial.⁴⁹Kriteria terhadap nasabah untuk pembiayaan mikro:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁰

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal menurut Athanasoglou “Merupakan variabel-variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen

⁴⁹ Mekari, “Insight Talenta,” Analisis SWOT, Strategi Jitu dalam Meningkatkan Kualitas Bisnis, 2020, <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/analisis-swot/>.

⁵⁰ Directory ASNI, “ASNI,” Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 3 Januari 2018, <https://asni.id/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>.

bank, tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian dan hukum yang akan berdampak pada kinerja lembaga keuangan.”⁵¹

a. Aspek Kebijakan Pemerintah di Sektor UMKM

Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. XVI/MPR-RI/ 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkeadilan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 tahun 1997 Tentang 2 Kemitraan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat

⁵¹Febrina Dwijayanthi dan Prima Naomi, “Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007 [English: Analysis of Effect of Inflation, BI Rate, and Exchange Rate on Bank Profitability (Period 2003-2007)],” *Jurnal Karisma* 3, no. 2 (2009): 87–98.

Kemitraan; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.⁵²

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, *multifinance*, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UKM.⁵³

b. Aspek Peranan Lembaga Terkait

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka

⁵²SH NPM WIKNYO, "Kebijakan Pemerintah Memberdayakan USAha Mikro, Kecil dan Menengah di Sektor Industri Kerajinan Menghadapi Mea 2015 (Studi Kasus di Kota Pontianak)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (t.t.): 8–9.

⁵³Ahmad Mukoffi, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Malang (UMKM)," *JAMSWAP* 3, no. 2 (2018): 63–72.

memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Peran lembaga keuangan diantaranya adalah:

- 1) Menghimpun dana masyarakat Lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- 2) Menyalurkan dana masyarakat Lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan distribusi keadilan dengan tujuan memberikan modal kerja, investasi dan konsumsi baik kepada kepala badan usaha yang biasa digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan (firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan Negara, maupun koperasi) maupun kepada para individu-individu dalam masyarakat baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- 3) Pengalihan aset (Asset Transfer) Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung.

- 4) Likuiditas (*Liquidity*) Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
- 5) Realokasi Pendapatan (*income reallocation*) Banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa yang akan datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya akan berkurang.
- 6) Transaksi (*Transaction*) Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito dan sebagainya merupakan bagian dan sistem pembayaran.⁵⁴

c. Aspek Peningkatan Manajerial

Integrasi aspek manajerial dengan aspek operasional dalam perusahaan dapat dilihat dalam proses pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan aset perusahaan yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang seluruhnya membutuhkan koordinasi dan pengorganisasian sehingga sumberdaya yang terbatas tersebut dapat digunakan secara optimal.

Aspek manajerial terkait proses implementasi tercermin dalam proses transformasi input menjadi output yang akan membutuhkan banyaknya proses pengambilan keputusan-keputusan operasional seperti seberapa besar *resources* yang

⁵⁴Jamal Wiwoho, "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 87–97.

diperlukan dan kualitas *product* yang sangat erat kaitannya dengan tingkat/kemampuan yang dimiliki *person in charge*. Setelah tahapan proses disetiap divisi dilakukan, perlu dilakukan proses *review* dan kontrol secara berkelanjutan sehingga seluruh aktifitas operasional tetap berada dalam koridor yang benar dan sesuai perencanaan.⁵⁵

d. Aspek Margin

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.⁵⁶

e. Pembiayaan Nasabah Macet

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.⁵⁷

⁵⁵Supply chain management, "Integrasi Aspek Manajerial dan Aspek Operasional," Integrasi Fungsi Manajemen Yang Dilakukan Oleh Manajer Dalam Setiap Aspek Manajerial Dan Aspek Operasional, 8 Februari 2013.

⁵⁶Dimastuti Ika Mawarni, "Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Perbankan Syariah," *Tugas Akhir Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2020.

⁵⁷Khomsatun Nafingah, "Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah DI BRI Syariah KCP Purbalingga," *Tugas Akhir Institut Agama Islam NegeriPurwokerto*, 2018, 37.

H. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan pertama kali oleh Thomas L Saaty. Saaty (2008) mengatakan bahwa, “*The Analytic Hierarchy Process* (AHP) is a theory of measurement through pairwise comparisons and relies on the judgements of experts to derive priority scales”. AHP adalah sebuah teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang bergantung kepada penilaian para pakar yang dapat menghasilkan skala prioritas.⁵⁸

1. Konsep Dasar AHP

Konsep dasar AHP adalah penggunaan matriks pairwise comparison (Matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot *relative* antar kriteria maupun *alternative*. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya. Dibantu dengan software expert choice. Expert Choise, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk melakukan analisa, sistematis, dan pertimbangan (justifikasi) dari sebuah evaluasi keputusan yang kompleks. Untuk mendapatkan solusinya, peneliti melakukan mewawancara dengan para ahli. Setelah itu hasilnya adalah kesimpulan yang diinginkan.⁵⁹

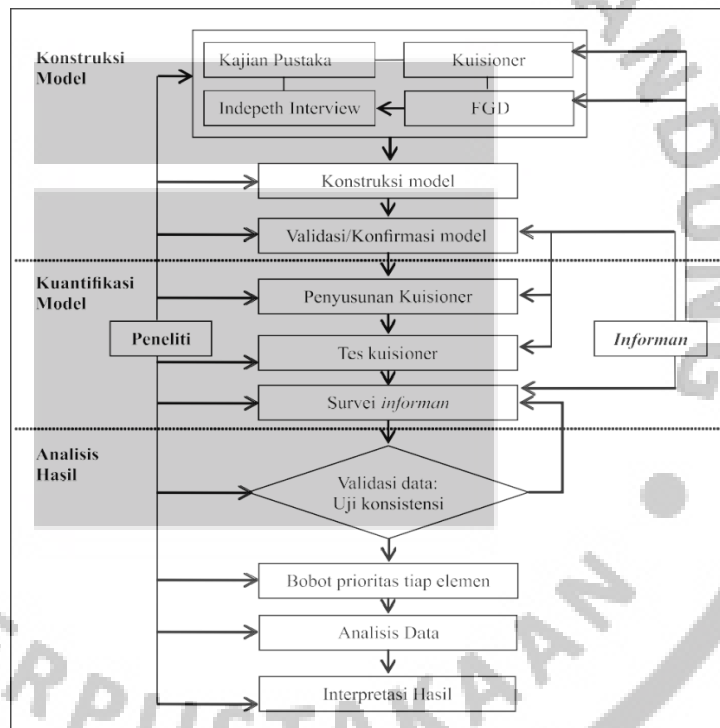
2. Tahapan-tahapan AHP

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP. Ada tiga tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah: konstruksi model, kuantifikasi model

⁵⁸ Huda dkk., “Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf.”

⁵⁹ Dewi, Malik, dan Ibrahim, “Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Terhadap Peningkatan Penjualan Produk IKM dengan Sistem E-Commerce Menggunakan AHP (Studi Kasus Pada IKM Binaan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).”

dan sintesis serta analisis. Tahapan konstruksi model AHP disusun berdasarkan kajian pustaka secara teori maupun empiris. Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuisisioner berupa perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih penting. Pengukuran dilakukan dengan skala numerik 1 - 9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan input melalui software Superdecisions. Sebelum data terolah dianalisis, akan dilakukan validasi data, yaitu dengan melakukan uji konsistensi.⁶⁰



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian AHP

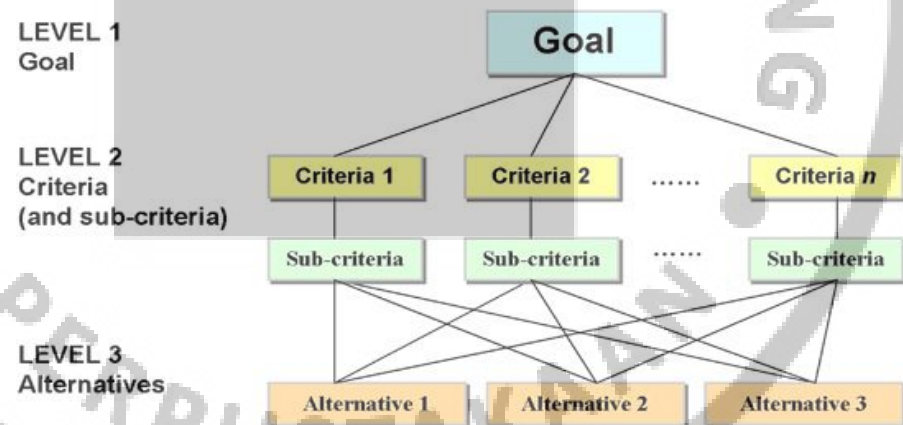
3. Langkah-langkah AHP

Langkah-langkah dan Proses *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Huda dkk., "Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf," 488.

- a. Mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif.
- b. Menyusun masalah kedalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur.

Penyusunan prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Proses ini menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matriks perbandingan berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki.⁶¹



Gambar 3. 2 Langkah-langkah penelitian AHP

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah

⁶¹Admin, "Pembahasan Lengkap Teori Analytical Hierarchy Process (AHP) menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Analytical Hierarchy Process (AHP)," idtesis.com, Desember 2018.

metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) yaitu sebuah teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang bergantung kepada penelitian para pakar yang dapat menghasilkan skala prioritas.

Saaty, menyatakan bahwa penyelesaian masalah dengan AHP terdapat beberapa prinsip dasar, yaitu: *Decomposition*, *Comparative Judgement*, dan *Synthesis of Priority*. *Decomposition* artinya memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut. *Comparative Judgement* adalah melakukan perbandingan antar elemen-elemen dalam hirarki yang disajikan dalam bentuk matriks. Perbandingan ini dilakukan dengan cara berpasangan antar elemen. Cara ini disebut juga *pairwise comparison*. Sementara itu hasil akhir dari seluruh prioritas adalah melakukan *Synthesis of Priority*. Dengan demikian maka akan diperoleh prioritas masing-masing elemen.⁶²

Penulis menggunakan *Software Expert Choice* untuk metode AHP. *Expert Choice* adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan analisa, sistematis, dan pertimbangan (*justifikasi*) dari sebuah evaluasi keputusan yang kompleks. *Expert Choice* telah banyak digunakan oleh berbagai instansi bisnis dan pemerintah diseluruh dunia dalam berbagai bentuk aplikasi, antara lain:

⁶² Nurul Huda dkk., "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (13 Maret 2015): 226, <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1232>.

- a. Pemilihan alternative
- b. Alokasi sumber daya
- c. Keputusan evaluasi dan upah karyawan
- d. *Quality Function Deployment*
- e. Penentuan prioritas
- f. Perumusan Strategi Pemasaran
- g. Evaluasi proses akuisisi dan merger
- h. Dan sebagainya

Penggunaan hirarki dalam *expert choice* bertujuan untuk mengorganisir perkiraan dan intuisi dalam suatu bentuk logis. Pendekatan secara hierarki ini memungkinkan pengambil keputusan untuk menganalisa seluruh pilihan untuk pengambilan keputusan yang efektif.⁶³ Ada tiga tahap yang akan dilakukan.⁶⁴

4. Konstruksi Model

Konstruksi model AHP disusun berdasarkan kajian pustaka secara teori maupun empiris. Penelitian ini melibatkan 5 orang sebagai ahli dalam bidang pembiayaan mikro di BRI Syariah Citarum dan 2 orang dosen yang ahli dalam bidang mata kuliah pembiayaan mikro. Dalam tahapan konstruksi model ini para informan diajak untuk melakukan diskusi secara mendalam (*in-depth interview*).

⁶³Bambang Wisanggeni, "Analytical Hierarchy Process (AHP)," AHP, Mei 2020, <https://bambangwisanggeni.wordpress.com/2010/03/02/analytical-hierarchy-process-ahp/>.

⁶⁴Huda dkk., "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)," 227.

5. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuisisioner berupa perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih penting. Pengukuran dilakukan dengan skala *numeric* 1-9. Intensitas kepentingan dari skala *numeric* tersebut yaitu 1 = kedua elemen sama pentingnya, 3 = elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya, 5 = elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya, 7 = satu elemen jelas mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya, 9 = satu elemen lebih penting mutlak daripada elemen yang lainnya, sedangkan pada angka 2,4,6,8 = Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan. Data hasil penelitian kemudian dikumpulkan dan input melalui soft-ware *Expert Choice*.

6. Sintesis dan Analisis

Sebelum data terolah di analisis, akan dilakukan validasi data, yaitu dengan melakukan uji konsistensi. Untuk melakukan uji konsistensi itu akan dihitung menggunakan *software Expert Choice*. Data dianggap konsisten jika memiliki nilai rasio konsistensi/*consistency ratio* (CR) < 0.1 (Saaty). Nilai CR > 0.1 maka akan dilakukan penilaian (*judgement*) ulang oleh informan. Nilai CR telah konsisten, maka bobot prioritas elemen yang telah ada dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis data dan interpretasi hasil.

I. Data Narasumber

Berikut merupakan narasumber yang mengerti mengenai pembiayaan mikro:

Tabel 2. 1 Data Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Ahmad	Laki-laki	Account Officer Micro
2.	Indra	Laki-laki	Account Officer Micro
3.	Daddy	Laki-laki	Account Officer Micro
4.	Hendy	Laki-laki	Account Officer Micro
5.	Malvin	Laki-laki	Account Officer Micro
6.	Herry	Laki-laki	Dosen
7.	Intan	Perempuan	Dosen

J. Kendall w atau Kendal Koefisien Konkordansi

Kendall W adalah pengukuran korelasi antara beberapa himpunan ranking pada “n” sebagai objek atau sampel berpasangan. Uji korelasi Kendall W digunakan untuk menguji asosiasi antara himpunan ranking. Kendall W (juga dikenal sebagai koefisien kesesuaian Kendall) adalah statistik non-parametrik. Ini adalah normalisasi statistik uji Friedman, dan dapat digunakan untuk menilai kesepakatan di antara penilai. Kendall's W berkisar dari 0 (tidak ada perjanjian) hingga 1 (perjanjian lengkap).